NusaBali



Ada Tunggakan Rp 30 Juta di PD Pasar

★ Temuan BPK,

Imbas Pelimpahan Pasar Kubutambahan

Tunggakan itu berasal dari mandegnya setoran keuntungan pengelolaan pasar tradisional yang ada di Desa/kecamatan Kubutambahan dan dikelola pihak desa.

SINGARAJA, NusaBali

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali, temukan tunggakan dana sebesar Rp 30 juta lebih dalam pembukuan Perusahaan Daerah (PD) Pasar. Tunggakan itu berasal dari mandegnya setoran keuntungan dari pengelolaan pasar tradisional yang ada di Desa/kecamatan Kubutam-

bahan.

Informasinya, pasar tradi-sional yang ada di Desa Kubutambahan dulunya berada dibawah pengelolaan PD Pasar. Namun dalam perjalanannya pihak desa meminta pasar tersebut dikelola sendiri karena lahan pasar seluas kurang lebih 1 hektare itu miliki desa adat. Akhirnya pada tahun 2007 silam, PD Pasar melepas penge-lolaan pasar itu dengan perjanjian pihak desa memberikan kontribusi kepada Pemkab Buleleng sebesar Rp 400 ribu pertahun. Diawal, kontribusi itu berjalan lancar, namun belakangan kotribusi itu tidak lagi sesuai dengan kesepakatan. Akhirnya, dalam pembukuan PD Pasar tercatat masih ada tunggakan piutang sekitar Rp 30 juta. Akibat tunggakan itu, BPK dalam setiap kali pemeriksaannya selalu temukan dana tersebut.

Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Buleleng I Putu Gede Satwikayadnya dikonfirmasi, membenarkan, kalau perusahaan masih memiliki piutang dari pihak pengelola Pasar Kubutambahan. Tunggakan itu berasal dari sharing keuntungan dalam pengelolaan pasar di Kubutambahan yang diserahkan kepada pihak desa. "Benar kita memiliki piutang dari pengelola Pasar Kubutambahan daan sampai sekarang belum dilunasi," katanya.

Menyusul tunggakan piutang Pasar Kubutambahan itu, lanjut Satwikayadnya, upaya penagihan sudah dilakukan baik dengan bersurat resmi hingga mendekati pihak pengelola pasar. Namun usaha tersebut belum membuahkan hasil. "Memang ini sudah lama jadi temuan BPK, kalau dibiarkan tentu pengelolaan keuangan kita dinilai tidak benar, nah kami harapkan pihak pengelola segara melunasi utangnya

Edisi : Kamis, 26 Maret 2015

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

Nusabali



Sambungan

itu." tegasnya

Sementara Kelian Desa Pakraman Kubutambahan, Jero Ketut Warkadea mengakui, hak pengelolaan pasar di desanya diserahkan melalui surat keputusan (SK) Bupati yang terbit September 2007. Pada SK tersebut diatur bahwa pihak pengelola wajib menyetorkan keuntungannya kepada pemerintah daerah.

Namun, pihaknya berdalih tidak menyetor keuntungan tersebut lantaran sampai tahun ini pasar tersebut belum pernah mendapat bantuan perbaikan. Padahal dulu pembangunan pasar itu dilakukan oleh masyarakat secara swadaya termasuk peturunan dari para pedagang yang berjualan di pasar Kubutambahan.

Selain itu, nilai setoran keuntungan antara Rp 400 hingga Rp 500 tiap tahun itu dianggap terlalu tinggi, Apalagi, pasar tersebut merupakan pasar desa dan pendapatan tidak sama dengan pasar di perkotaan. "Belum ada bantuan untuk pemerliharaan bangunan bahkan membangun pura melanting pedagang membayar dana peturunan, sehingga dengan pertimbangan itu setoran keuntungan itu tidak dibayar," katanya.

hal z

Edisi	:	Kamis,	26	Maret	2015	
Hal	:	4				

VIISE BELL



Musrenbang Provinsi Bali Diharapkan Lahirkan Gagasan yang Inovatif

Musyawarah Perencanaan Pem-bangunan (Musrenbang) Provinsi Bali Tahun 2015 diharapkan melahirkan ide dan gagasan yang inovatif dalam perumusan program pembangunan serta optimalisasi sumber-sumber pendapatan, khususnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali. Demikian sambutan Gubernur Bali Made Mangku Pastika, yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta dalam acara Pembukaan Musrenbang Provinsi Bali Tahun 2015, di di Gedung Wiswasabha Utama-Kantor Gubernur Rali Selasa (25/3) Bali, Selasa (25/3).

la menyampaikan sejumlah isu strategis Provinsi Bali yang akan dirumuskan untuk tahun 2016, diantaranya; Ketimpangan pembangunan antar wilayah, sektor ekonomi dan antara masyarakat; Ketahanan pangan ekonomi dan antara masyarakat; Ketahanan pangan dan penganekaragaman sumber karbohidrat non beras; Tata kelola pemerintahan dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk; Peningkatan kualitas SDM serta optomalisasi kapasitas lembaga adat, dan beberapa isu lainnya. Selanjutnya isu ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam menyusun perencanaan pembangunan yang terarah, terukur, aplikatif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali.

Wagub secara khusus berharap kepada Mendagri agar dana perimbangan untuk daerah

Magub secara khusus berharap kepada Mendagri agar dana perimbangan untuk daerah yang tertuang dalam UU NO.17 th 2013 tentang Keuangan Daerah, direvisi. Hal ini terkait dengan isi pasal tersebut yang memberikan dana perimbangan lebih banyak; kepada daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun, menurutnya 34 provinsi yang ada di Indonesia tidak memiliki SDA yang merata oleh karenanya mesih teriadi. yang merata oleh karenanya masih terjadi ketimpangan disetiap daerah. "Seperti di Bali misalnya, dana perimbangan terakhir yang kita terima sebesar Rp 980 miliar, sedangkan devisa yang disetorkan Balitiap tahunnya ke Pusat sudah tercatat.

disetorkan Bali tiap tahunnya ke Pusat sudah tercatat Rp 41 triliun lebih, sekarang mungkin sudah mencapai Rp 47 triliun. Oleh karenanya kita mengusulkan dana perimbangan bisa diselaraskan agar pemerataan pembangunan bisa terjadi," jelasnya.

Pada kesempatan itu dilaksanakan penyerahan anugrah 'Pangripta Nusantara' Tingkat Provinsi Bali Tahun 2015 sebagai Kabupaten/Kota yang memiliki dokumen perencanaan terbaik di Provinsi Bali. Tiga Kab/Kota berhasil meraih penghargaan tersebut, vaitu Kabupaten Karangasem menempati posisi yaitu Kabupaten Karangasem menempati posisi pertama, Kabupaten Jembrana menempati urutan kedua dan Kota Denpasar meraih juara ketiga. Ketua Pelaksana Musrenbang Provinsi Bali, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



(Bappeda) Provinsi Bali, melaporkan bahwa musyawarah ini dilaksanakan selama tiga hari dari tanggal 25-27 Maret diikuti oleh 160 orang peserta, diharapkan dapat menghasilkan dokumen perencanaan terintegrasi yang akan digunakan untuk pembuatan RKPD

Sementara itu, Kepala Bappenas RI yang diwakili oleh Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Kea-manan RI Rizky Feriyanto, menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Provinsi Bali atas beberapa isu strategis yang menjadi landasan dalam pembangunan daerah. Hal tersebut dinilai telah selaras dengan sembilan agenda prioritas pembangunan Nasional yang disebut 'Nawa Cita'. Iaberharap sinergitas Pusat dan Daerah dapat bersinergi dan sinkronisasi dengan baik, selain itu musyawarah ini dapat menyelaraskan RPJMN dengan RPJMD 2015-2019.

Selanjutnya la menambahkan bahwa, terkait dengan isu strategis yang ada di Bali pihaknya mengusulkan beberapa rekomendasi dan saran, mengusulkan beberapa rekomendasi dan saran, salah satunya perlu dilakukan peningkatan iklim investasi yang lebih baik, melalui kemudahan perijinan usaha dan pelaksanaan prosedur perijinan melalui Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), memberdayakan usaha kecil dan menengah khususnya UKM kreatif, Peningkatan kualitas insfrastruktur energi listrik dan jalan, khususnya jaringan jalan Bali Timur dan Utara. Ia berharap dengan rekomendasi ini dapat menjadi masukan untuk pelaksanaan Musrenbang kali ini.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Kementrian

Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Kementrian Dalam Negeri RI yang diwakilkan oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil RI, Kementrian Keuangan RI yang diwakili oleh Sekretaris Dirjen Perimbangan Keuangan RI, Bupati/Waki kota se-Bali, Forum Komunikasi Pemerintah Daerah serta undapagan keingan

undangan lainnya. @

Edisi	: Kamis 26 Waret 2015
Hal	: 3

Nusabali



Sidang Kasus Mantan Bupati Klungkung

Dagang Kaset, Tukang Sapu, hingga Karyawan Fotocopy Jadi Saksi

DENPASAR, NusaBali

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan 13 saksi terkait kasus pencucian uang yang diduga dilakukan mantan Bupati Klungkung, I Wayan Candra di Pengadilan Tipikor Denpasar pada, Rabu (25/3). Selain dua petugas bank, JPU juga menghadirkan dagang kaset, tukang sapu, pegawai fotokopi hingga petani.

Menariknya, salah satu saksi yang dihadirkan malah tidak tahu menahu soal kasus yang membelit mantan orang nomor satu di Klungkung ini. Saksi tersebut bernama Sindu Bratadiharja yang bekerja sebagai pedagang kaset. Saat diperiksa majelis hakim pimpinan Hasoloan Sianturi, Sindu yang disebut JPU pernah menarik uang Rp 100 juta dari rekening terdakwa langsung membantahnya. "Saya tidak pernah transaksi uang sebanyak itu," ujarnya saat diperiksa.

Bahkan, pria yang rambutnya sudah memutih ini mengaku tidak mengenal terdakwa. "Saya cuma tahu Pak Candra, tapi saya tidak kenal. Hanya saya pernah salaman dengan dia waktu saya jadi pelatih basket di Klungkung," ujarnya polos. JPU lalu sempat menunjukkan slip penarikan yang di dalamnya berisi KTP Sindu dan tandatangannya. Namun lagi-lagi pria berusia uzur ini membatahnya dan mengatakan tidak pernah melakukan transaksi uang sebanyak itu.

Terkait keberadaan KTP yang digunakan menarik uang, Sindu membenarkannya. Namun untuk tandatangan, ia



PARA saksi saat memberikan kesaksiannya dalam sidang dugaan pencucian uang oleh mantan Bupati Klungkung, I Wayan Candra di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (25/3).

meragukannya. "Saya tidak pernah transaksi uang sebanyak itu," beber Sindu yang langsung dipersilakan meninggalkan ruang sidang oleh majelis hakim.

Śelain Sindu, JPU juga menghadirkan Wayan Gotong yang merupakan tukang sapu di rumah terdakwa.

JPU menyebut Gotong sempat menarik uang Rp 50 juta dari rekening terdakwa untuk pembayaran tanah. Namun, keterangan tersebut dibantah Gotong yang mengaku uang tersebut dipinjam untuk keperluan upacara. "Memang sebelumnya untuk membayar tanah. Tapi karena tanah saya rusak karena bencana alam, perjanjian itu batal," jelasnya.

Saat diperlihatkan kwitansi pembayaran yang berisi catatan jika uang tersebut untuk pembayaran tanah, Gotong kembali membantahnya.

Baru saat kuasa hukum terdakwa, Suryatin Lijaya menanyakan apakah tanah tersebut akan dijual atau dijaminkan atas pinjaman uang Rp 50 juta tersebut, Gotong mengatakan jika tanah tersebut dijaminkan untuk pinjaman uang. "Tanah itu saya jaminkan ke Pak Candra," jelas

Namun hingga saat ini ia mengaku belum bisa membayar pinjaman Rp 50 juta tersebut karena tidak punya uang. "Nanti kalau tanah saya laku rencananya baru saya bayar ke Pak Candra," ujar tukang sapu di rumah terdakwa ini. Selain dagang kaset dan tukang sapu, pegawai fotokopi bernama Kusdianto yang dikatakan sempat menarik uang dari rekening terdakwa juga mengaku tidak tahu menahu soal kasus ini. "Saya hanya disuruh bos saya untuk mencairkan cek. Uang apa itu saya tidak tahu," beber pegawai fotokopi di Klungkung ini. 🖷 rez

Edisi : kamis 26 Naret 2015

Hal : $\frac{5}{}$